

gerdai info

Edisi X | Januari 2011 | Tahun 2 | Newsletter Bank Indonesia

DARI MEJA REDAKSI

Bila kita berbicara inflasi, kesan yang segera muncul dibenak masyarakat adalah sesuatu yang jelimet dan menakutkan. Dikatakan jelimet karena memang ketika kita membahas inflasi tak akan lepas dari bingkai teori ekonomi. Sedangkan pada sisi lain, sebagaimana terungkap dari berbagai survei di sejumlah negara, inflasi adalah sosok yang menakutkan. Bagaimana tidak, bila figur inflasi ini nyata-nyata menggerus kekayaan masyarakat secara diam-diam, bahkan dari berbagai laporan penelitian diketahui bahwa sosok inflasi membuat kelompok miskin semakin miskin sehingga memperlebar jurang kesenjangan antara yang kaya dan miskin.

Pada GERDAI INFO edisi kali ini, topik yang "jelimet dan menggeramkan" itu pun sengaja diangkat kepermukaan. Memang harus diakui bahwa inflasi di satu sisi dapat membawa efek negatif seperti melorotnya daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Tapi pada sisi lain inflasi juga diperlukan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Persoalannya tinggal bagaimana otoritas yang dipregraya mengendalikan inflasi (Pemerintah dan Bank Indonesia) bisa bekerjasama dalam mengelolanya agar tidak liar tapi masih dalam batas-batas yang wajar dan nyaman. Kami berharap selepas membaca *newsletter* ini, pembaca semakin mahfum akan hakikat inflasi dan tahu persis bagaimana mesti mengikapinya. ●

Salam,
Difi A. Johansyah
Kepala Biro Humas Bank Indonesia

Redaksi
Penanggung Jawab: Dyah NK. Makhijani
Pemimpin Redaksi: Difi A. Johansyah
Redaksi Pelaksana: Harymurthy Gunawan,
Rizana Noor, Tutut Dewanto, Risanthy Uli N,
Dedy Irianto, Dyah Woelandari

Alamat Redaksi
Humas Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin 2 - Jakarta
Telp. : 021 - 3817317 / 3817187
email : humasbi@bi.go.id, website: www.bi.go.id

Redaksi menerima kiriman naskah dan mengedit naskah sebelum dipublikasikan.

■ Inflasi:

Asal Terkendali, Bikin Rakyat *Happy*

Law of inflation: whatever goes up will go up some more.
Begitulah hukum inflasi, apa yang sudah naik akan terus naik. Bukankah kalau harga barang atau jasa yang kadung naik akan terus melambung dan kalau pun harga itu turun, tetap saja sudah di atas harga sebelumnya. Ketika harga-harga naik, itulah yang dikatakan bahwa telah terjadi gejala inflasi. Lalu, apa yang dimaksud dengan inflasi? Secara gampang, inflasi kerap diterjemahkan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum (agregat). Kenaikan harga-harga itu haruslah meluas yang artinya tidak hanya memperhitungkan kenaikan harga satu atau dua jenis barang dan jasa saja, melainkan juga seluruh barang dan jasa yang mempengaruhi pola pengeluaran masyarakat.

Lantas, apa sih yang biasanya menjadi pemicu kenaikan harga secara umum (inflasi)? Setidaknya, ada dua biang keladi penyebab inflasi. Sebab pertama adalah kenaikan harga-harga yang dipicu oleh meningkatnya permintaan (barang/jasa) sementara pasok tidak cukup mengimbangi (*demand side inflation*). Sedangkan sebab kedua terjadi akibat kelangkaan produksi (barang) meskipun permintaan tidak mengalami peningkatan dan/atau kenaikan harga yang ditetapkan Pemerintah, kenyataan ini lumrah disebut inflasi bersumber dari kendala sisi pasokan (*supply side inflation*).

Inflasi yang bersumber dari gangguan sisi permintaan (*demand side inflation*) biasanya dikelompokkan Inflasi Inti (*core inflation*). Laju inflasi kelompok ini dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar, permintaan dan penawaran dan ekspektasi publik. Sedangkan inflasi yang dipicu oleh gejolak kenaikan harga barang, misalnya, kenaikan harga cabe yang melangit karena terganggunya pasok dikelompokkan sebagai *volatile food*. Sementara kenaikan harga barang/jasa yang dikarenakan kebijakan pemerintah seperti kenaikan BBM, tarif listrik, STNK dikelompokkan *administered price*. Ketiga kelompok inflasi tersebut lazim disebut inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK).

Dalam menentukan inflasi IHK, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan survei terhadap 774 komoditi yang pergerakan harganya secara berkala di survei di 66 kota. Penentuan komoditi apa saja yang masuk IHK dievaluasi setiap lima tahun sekali. Hasil survei itu memperlihatkan bahwa Kelompok Inflasi Inti terdiri atas 692 komoditi (65,63%) seperti uang sewa rumah, sepeda motor, mobil dan lainnya). Kelompok *volatile*

food terdiri atas 61 komoditi (16,06%). Masuk dalam kelompok ini adalah cabe, beras, minyak goreng, telur ayam, bawang merah dan lainnya. Sedangkan kelompok *Administered Price* berisi 21 komoditi (18,31%) yang terdiri atas tarif listrik, PAM, tiket kereta dan lainnya.

Bila melihat paparan di atas, lalu di mana peran Bank Indonesia selaku otoritas moneter dalam menjaga agar inflasi rendah dan stabil. Undang-Undang memberi mandat kepada bank sentral untuk mengawal stabilitas nilai rupiah yang tercermin dari stabilitas harga (inflasi). Amanat UU itu diterjemahkan BI melalui serangkaian kebijakan moneter dalam mengendalikan atau mempengaruhi tekanan harga. Pengaruh tekanan harga bersumber dari sisi permintaan secara umum (agregat) terhadap sisi penawaran yang satu dekade terakhir relatif stabil bahkan ada tren menurun.

Mengapa BI hanya merespons pada inflasi bersumber permintaan? Karena karakteristik instrumen moneter BI lebih kuat mempengaruhi sisi permintaan. Sedangkan efektivitas instrumen moneter terhadap harga bahan makanan yang bergejolak dan harga yang ditetapkan pemerintah amat rendah. Disamping itu, pergerakan harga tersebut banyak disebabkan oleh faktor musiman dan kejutan yang akan berlalu seiring perjalanan waktu. Namun demikian bukan berarti BI tak peduli terhadap yang inflasi bersumber dari *volatile food* dan *administered price*. Kenapa? Karena bila kedua hal itu mengalami kenaikan akan berpeluang meningkatkan harga barang pada inflasi inti.

Sebagai negara berkembang, inflasi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh harga yang ditetapkan Pemerintah dan harga bahan makanan di pasar. Bila melihat kondisi seperti itu, dapatlah dimengerti betapa krusialnya koordinasi antara Pemerintah dan BI. Salah satu wujud nyata koordinasi itu dibentuknya Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat dan daerah. Bahkan, sejak awal Pemerintah dan BI membahas dan mematok angka inflasi yang ingin disasar. Misalnya, sasaran inflasi tahun 2011 dibidik 5% dengan deviasi +/- 1%. Nah, target inflasi itu hanya bisa digapai bila Pemerintah dan BI bahu-membahu menyatakan perang terhadap "hantu" inflasi guna memperkecil jurang ketimpangan antara mereka yang kaya dan miskin yang disebabkan inflasi, mempertahankan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Siapa *sih* rakyat yang tak *happy* kalau inflasinya terkendali. ●

Nah, Ini Jurus Mengendalikan Inflasi

Ibarat orang mengendalikan laju sebuah kendaraan, selain diperlukan teknik mengemudi yang baik juga perlu kepiawaian dalam melakukan koordinasi antara fungsi rem dan gas. Si pengemudi harus paham betul kapan mesti injak rem dan kapan tancap gas. Ilustrasi tersebut barangkali cocok untuk menggambarkan bagaimana upaya pengendalian inflasi itu dilakukan. Kebijakan pengendalian inflasi ibarat rem dalam pengelolaan ekonomi ketika upaya memacu pertumbuhan, seperti kendaraan sedang tancap gas.

Bank Indonesia mendapat amanat UU untuk menjaga stabilitas rupiah termasuk pengendalian inflasi. Untuk mengendalikan inflasi tersebut, BI mengelola permintaan masyarakat agar tidak melebihi kemampuan perekonomian dalam memasok barang dan jasa. Tekanan inflasi muncul saat permintaan melebihi pasokan. Untuk mengelola permintaan tersebut, BI mengatur suku bunga perekonomian melalui penetapan BI Rate agar kebutuhan konsumsi dan investasi masyarakat tidak melebihi ketersediaan barang dan jasa.

BI akan menaikkan BI Rate bilamana inflasi dipandang akan berada di atas sasarannya.

Penetapan BI Rate akan mempengaruhi suku bunga bank, baik untuk simpanan maupun kredit. Pada saat BI Rate naik, suku bunga bank akan meningkat yang menyebabkan kenaikan tabungan dan deposito, serta memangkas 'nafsu' konsumsi dan investasi. Penurunan konsumsi dan investasi berarti mengembalikan permintaan mendekati penawaran, yang ujung-ujungnya meminimalkan kenaikan harga (inflasi rendah).

Upaya pengendalian inflasi juga dilakukan BI dengan menjaga stabilitas nilai tukar. Ketika nilai tukar menguat (apresiasi) maka barang impor bisa lebih murah sehingga menurunkan inflasi. Namun penguatan nilai tukar ini membuat produk domestik berkurang daya saingnya yang menurunkan ekspor, sehingga berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Idealnya, sebagai titik tengah, nilai tukar yang stabil adalah solusi.

Namun, sisi penawaran barang dan jasa juga penting untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil. Pemerintah juga berkepentingan dalam menjaga inflasi dengan mendorong sisi penawaran guna mengimbangi permintaan, diantaranya dengan meningkatkan produksi, menjaga pasokan dan memperlancar distribusi

barang dan jasa, baik di tingkat nasional dan daerah. Upaya ini ditempuh pemerintah dengan mengoptimalkan kebijakan fiskal dan berbagai kebijakan sektoral. Pemerintah juga terus berupaya menggenjot produksi barang dan jasa dengan menyediakan infrastruktur dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Berbagai langkah tersebut diperkuat melalui koordinasi kebijakan antara BI dengan Pemerintah. Sejak tahun 2005 dibentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI), dan mulai tahun 2008, koordinasi ini terus dikembangkan hingga ke daerah dengan berdirinya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Dengan keberadaan tim tersebut diharapkan sumber-sumber gangguan inflasi di daerah akibat permasalahan sisi pasokan dan distribusi dapat diminimalkan.

Nah, pada akhirnya berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah dan BI menunjukkan komitmen dalam mengendalikan inflasi. Kesungguhan para pengambil kebijakan dalam mengendalikan inflasi diharapkan akan meningkatkan keyakinan dan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam bentuk penetapan harga oleh para pelaku ekonomi. ●



Ir. Difi A. Johansyah, MBA *)

Inflasi Itu Manusiawi Lho!

Mungkin *gawean* yang paling susah bagi kehumasan bank sentral adalah "meminta" masyarakat memahami apa itu ekspektasi inflasi. Dapat dipahami karena inflasi sendiri merupakan istilah yang terlalu tinggi untuk dicerna masyarakat umum. Orang tahunya kenaikan harga! Nah, sekarang ditambah kata ekspektasi! Kata orang Medan, "Apa pula itu *bah!*". Apa pula itu inflasi, ekspektasi inflasi, inflasi inti yang saat ini menjadi topik dan *headline* koran-koran ekonomi nasional?

Istilah ekspektasi inflasi boleh jadi muncul dari keputusan para tabib dan pendekar ekonomi yang selama bertahun-tahun mencari ramuan mujarab mengendalikan kenaikan harga, kerennya inflasi, yang kata mereka adalah fenomena moneter. Karena fenomena moneter, mereka percaya adanya hubungan antara

harga barang-barang dengan jumlah uang yang dikeluarkan bank sentral. Dengan bekal kepercayaan ini, para empu ekonomi ini melakukan tes dan eksperimen berkali-kali untuk mencari ramuan mujarab yang berbentuk rumus dan logika sebab akibat. Tapi apa lacur, ramuan ajaib ini tidak pernah *nongol!*

Tentu para punggawa ekonomi, yang tiap tahun dapat hadiah Nobel, harus punya penjelasan kenapa ramuan ajaib ini gak pernah ketemu! Lucunya penjelasan itu datang setelah para ekonom tadi tidak lagi berpikir sebagai ekonom, tetapi sebagai psikolog atau antropolog! Ternyata ekonomi bukan cuma rumus matematik! Tapi ekonomi ternyata adalah perilaku dan cara pikir manusia! Dan manusia punya ekspektasi tidak hanya berdasar pengalaman masa lalu tapi juga berdasar harapan dan juga "ketakutan"

akan masa depan. Nah, inflasi pun, sesuai dengan perilaku manusia, muncul dari harapan dan ketakutan pelaku ekonomi kedepan, yang menciptakan konsensus akan tingkat harga kedepan. Konsensus ekspektasi ke depan tinggi maka harga akan ikut menjadi tinggi juga begitu juga sebaliknya. *Kun Fayakun!*

Pertanyaannya, kalau ekspektasi inflasi adalah tingkah laku masyarakat, bagaimana bank sentral mempengaruhinya? Hmmm.... mungkin ke depan Gubernur Bank Sentral tidak perlu seorang Doktor Ekonomi dengan berbagai rumusnya, tapi seorang ahli ilusi seperti Deddy Corbuzier yang punya ilmu sakti mempengaruhi perilaku manusia. Intinya, inflasi juga manusia! Selesaikan secara manusiawi juga! ●

*) Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Direktorat Perencanaan Strategis & Hubungan Masyarakat

“Managing Inflation Expectation is our Business”

Sugeng *)

“**Dengan modal kredibilitas dan komunikasi kebijakan yang baik, ekspektasi inflasi dapat diarahkan untuk mencapai target.**”



*) Kepala Biro Kebijakan Moneter,
 Direktorat Riset Ekonomi
 dan Kebijakan Moneter
 - Bank Indonesia

Managing inflation expectation is the key to manage inflation. Mengapa pengendalian ekspektasi inflasi menjadi kunci keberhasilan menjaga inflasi? Keputusan ekonomi yang diambil oleh pelaku ekonomi seperti rumah tangga dan dunia usaha seringkali dipengaruhi oleh bagaimana ekspektasi pelaku ekonomi tersebut terhadap prospek ekonomi ke depan.

Jika semua pelaku ekonomi memiliki ekspektasi bahwa inflasi akan tinggi pada akhir tahun, maka sangat mungkin inflasi akhir tahun sebesar yang diekspektasikan pelaku ekonomi, demikian pula sebaliknya. Hal ini dapat terjadi karena pembentukan harga sudah memperhitungkan ekspektasi inflasi tersebut. Akibatnya, jika semua pelaku ekonomi, baik produsen dan konsumen melakukan hal yang sama, maka harga yang terbentuk menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Hal ini yang mendasari mengapa bank sentral menaruh perhatian dan upaya sangat besar untuk mengendalikan ekspektasi inflasi.

Persoalannya, besarnya ekspektasi inflasi tidaklah sama untuk setiap pelaku ekonomi, dan kita tidak dapat mengetahui secara tepat berapa besar peranan ekspektasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi oleh setiap pelaku ekonomi tersebut. Berdasarkan kajian BI, dalam membentuk ekspektasi inflasi, pelaku ekonomi lebih suka memakai data inflasi masa lalu sebagai referensi, ketimbang menggunakan target inflasi yang diumumkan. Kondisi ini menjadi tantangan berat bagi BI agar dapat meyakinkan pelaku ekonomi untuk menggunakan target inflasi BI sebagai ekspektasi inflasinya.

Dalam konteks itu, menjadi penting bagi BI untuk ‘mempropagandakan’ secara terus-menerus sasaran inflasi jangka menengah-panjang. Pemerintah, setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 143 / PMK.011/2010 tanggal 24 Agustus 2010 menetapkan sasaran inflasi jangka pendek yaitu $5\% \pm 1\%$ untuk 2010 dan 2011, serta $4,5\% \pm 1\%$ untuk 2012. Disamping itu, dalam jangka menengah, target inflasi yang menjadi visi BI adalah pada kisaran 3,5%, sejajar dengan inflasi negara-negara kawasan. Inflasi rendah dalam jangka panjang disamping meningkatkan daya saing, juga akan meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Ini pada

gilirannya juga berkontribusi pada pencapaian inflasi rendah di periode berikutnya.

Dalam mengubah *mindset* pelaku ekonomi sehingga terbentuk ekspektasi inflasi yang sama dengan target, dibutuhkan kredibilitas kebijakan. Seseorang baru akan meyakini dan mengikuti apa yang disampaikan oleh orang lain, jika sudah terbentuk kepercayaan di antara mereka. Kepercayaan tersebut dibangun melalui suatu proses panjang pembuatan rekam jejak.

Menghadapi beratnya tantangan dalam pengelolaan ekspektasi inflasi tersebut, BI telah menempuh berbagai langkah untuk meningkatkan kredibilitas kebijakan moneter. Satu aspek penting untuk meningkatkan kredibilitas tersebut adalah pentingnya komitmen untuk mencapai target inflasi dari waktu ke waktu. Selain itu, aspek profesionalisme juga memegang peranan penting sehingga setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar pertimbangan yang jelas dan lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam hal membangun kredibilitas kebijakan adalah transparansi dan tata kelola (*governance*) yang baik. Komitmen, profesionalisme, transparansi serta tata kelola yang baik tersebut akan membangun kepercayaan. *Do what you say, and say what you do.*

Aspek yang tidak kalah pentingnya untuk mengarahkan ekspektasi inflasi adalah strategi komunikasi kebijakan moneter. Strategi komunikasi yang ditempuh akan menentukan bagaimana informasi yang akan disampaikan bank sentral dapat diterima oleh pelaku ekonomi secara baik dan dimengerti secara benar. Terlebih dalam era informasi seperti saat ini, tuntutan untuk dapat menyediakan informasi secara lengkap, jelas dan tepat waktu menjadi tantangan tersendiri bagi bank sentral.

Menyadari pentingnya komunikasi kebijakan moneter dan dampaknya terhadap pembentukan ekspektasi pelaku ekonomi, banyak pihak yang menyatakan bahwa komunikasi saat ini merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter. Dalam prakteknya, untuk dapat melaksanakan strategi komunikasi kebijakan moneter secara tepat bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal ini antara lain karena tingkat pemahaman dari setiap kelompok masyarakat tidak sama, sehingga memerlukan pendekatan komunikasi yang berbeda-beda untuk setiap kelompok tersebut, *no size fits all.* ●

Inflasi, Kesenjangan Ekonomi Dan Kebijakan Moneter

Haris Munandar, PhD *)

“Ketimpangan merupakan ibu dari ketidakstabilan dan kriminalitas” (Aristoteles).

Perkembangan harga-harga pada tahun 2010 yang terus merangkak naik memang patut dicemaskan. Harga komoditas internasional yang mulai membumbung, terutama pada komoditas pangan, serta mulai merambat naiknya (lagi) harga minyak, memberi dampak tekanan pada inflasi dalam negeri. Inflasi 2010 tercatat sebesar 6,96%, sementara pada Januari 2011 secara tahunan sudah mencapai 7,02%, yang berarti meningkat secara signifikan dibanding 2009 (2,78%). Inflasi yang tak terkendali merupakan penyakit perekonomian yang wajib diwaspadai, karena perlahan namun pasti menurunkan daya beli masyarakat. Secara elegan, Milton Friedman, pemenang hadiah Nobel Ekonomi mengatakan “Inflasi adalah suatu bentuk pajak yang dapat diterapkan tanpa perlu undang-undang.” Dalam ungkapan yang lebih agresif, tak kurang seorang Ronald Reagan pernah geram berkata, “Inflasi itu kasar seperti penjabret, menakutkan seperti perampok bersenjata, dan mematikan seperti penembak ulung.”

Perkembangan inflasi tersebut memang perlu diwaspadai karena ternyata terdapat sejumlah bukti kuat adanya keterkaitan antara inflasi dan ketimpangan pendapatan masyarakat. Pendapat Aristoteles dan Ronald Reagan justru saling menguatkan.

Hubungan antara inflasi dan ketimpangan pendapatan masyarakat dapat dipahami dengan mempertimbangkan kondisi bahwa masyarakat miskin rentan terhadap inflasi. Ini disebabkan karena rumah tangga miskin memegang kekayaannya dalam bentuk uang kas (yang notabene tidak memiliki *return*), dengan proporsi yang jauh lebih besar dibandingkan rumah tangga kaya. Karena seiring berjalannya waktu uang kas akan terkikis oleh inflasi, bisa dimengerti pendapatan kelompok miskin yang pas-pasan tergerus secara lebih dahsyat oleh inflasi dibandingkan pendapatan kelompok kaya. Disamping itu, kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi biasanya akan memiliki akses yang lebih besar ke lembaga keuangan sehingga dapat memanfaatkan instrumen keuangan guna membentengi rumah tangganya dari inflasi, misalnya melalui penempatan di tabungan, deposito, saham, obligasi atau reksadana. Masyarakat berpendapatan tinggi biasanya juga memiliki aset tak bergerak seperti rumah dan

tanah yang nilainya juga akan meningkat sejalan dengan kenaikan inflasi.

Keyakinan ini sejalan dengan temuan di berbagai negara yang menunjukkan bahwa inflasi memperlebar jurang ketimpangan ekonomi. Bukti survei di 38 negara menunjukkan kelompok miskin lebih sering menyebut kenaikan harga sebagai biang keladi penggerogot daya beli sehingga mengakibatkan kelompok miskin menjadi semakin miskin. Temuan Stefano Albanesi, profesor ekonomi dari *Columbia University* pada 2007 di 51 negara industri dan berkembang juga memperkuat kegalauan kelompok miskin ini. Nah, memang terdapat bukti-bukti yang sulit dibantah bahwa negara-negara dengan inflasi tinggi cenderung memiliki distribusi pendapatan yang timpang.

Sejumlah temuan tersebut jelas mengindikasikan pentingnya menjaga inflasi untuk mencegah memburuknya kondisi kemiskinan dan distribusi pendapatan masyarakat, yang dapat mengarah pada kondisi ketidakstabilan dan kriminalitas, seperti diramalkan oleh Aristoteles sekitar 2,5 abad yang lalu.

Hubungan antara ketimpangan pendapatan dan inflasi ini semakin mengangkat peran penting otoritas moneter dalam mengendalikan inflasi. Di Indonesia, otoritas yang diberi kewenangan ialah Bank Indonesia. Dengan kewenangan yang dimilikinya, BI berupaya untuk memperkecil kesenjangan yang dipicu oleh inflasi antara kelompok kaya dan miskin. Sayangnya ongkos untuk mengawal inflasi tadi tidaklah murah dan terkadang sampai menggerus modal bank sentral. Ya ...begitulah *nature* dan *khittah* otoritas moneter di seluruh dunia yang diberi tugas oleh undang-undang menjaga inflasi demi kemaslahatan yang lebih besar bagi bangsa.

Posisi bank sentral yang strategis namun terkadang dilematis itu perlu dipahami secara seragam oleh semua pihak, baik masyarakat, parlemen, pemerintah maupun pihak bank sentral sendiri, untuk kemudian dicari jalan keluarnya secara adil dan bijak dengan mengedepankan kepentingan bangsa (*for a greater good*) seraya menggunakan tata kelola yang baik (*good governance*). Tata kelola yang baik ini pada akhirnya akan berkontribusi pada upaya mengurangi ketimpangan pendapatan. Sebagaimana pepatah Cina kuno yang dikumandangkan Confucius, sang maha guru etika, “Di negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik, ditemukannya kemiskinan membuat malu, sementara di negara yang diatur secara salah, justru kekayaan yang membuat malu.” ●

“ Dengan kewenangan yang dimilikinya, BI berupaya untuk memperkecil kesenjangan yang dipicu oleh inflasi antara kelompok kaya dan miskin. ”



*) Staf Gubernur Bank Indonesia -
Analisis di Direktorat Perencanaan
Strategis dan Hubungan Masyarakat



■ **Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID):**

Wadah Penjinak **Inflasi Daerah**

Rahmad Hadi N *)

Inflasi secara nasional memang tidak dapat dipisahkan dengan bagaimana mengelola inflasi daerah. Hal ini setidaknya tergambar pada cara penghitungan inflasi oleh BPS yang melakukan perhitungan komposit atas perkembangan harga yang terjadi di sejumlah 66 kota di Indonesia. Dari sejumlah kota yang disurvei tersebut, Jakarta memiliki bobot mencapai 22% dalam penghitungan inflasi, sedangkan selebihnya sebanyak 78% dipengaruhi oleh perkembangan di 65 kota lainnya. Fakta tentang banyaknya kota yang mempengaruhi inflasi ini mencerminkan bahwa upaya menjaga stabilitas harga secara nasional akan banyak dipengaruhi oleh pergerakan inflasi daerah.

Memahami pentingnya pengendalian inflasi di daerah tersebut, satu sinergi kebijakan ditempuh. Sinergi kebijakan ini menunjukkan semakin tingginya perhatian Pemerintah Daerah terhadap upaya bersama untuk mengendalikan harga.

Jika di tingkat pusat, upaya memperkuat koordinasi dan penyaluran kebijakan lintas instansi dilakukan dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi (TPI), di daerah juga telah dibentuk TPI Daerah (TPID). TPID berperan besar dalam menjaga kestabilan harga melalui langkah-langkah preventif sebelum gejolak harga terjadi seperti mengevaluasi sumber dan potensi tekanan inflasi di masing-masing daerah. TPID juga berperan sebagai *advisor*

bagi Kepala Daerah dalam pengambilan kebijakan sebagai tindakan kuratif jika gejolak harga terjadi seperti menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan, meminimalkan dampak *administered prices* (kenaikan tarif, upah, dsb), serta memperluas akses informasi harga kepada masyarakat. Hingga saat ini, TPID yang telah terbentuk sebanyak 53 TPID dibandingkan posisi akhir 2009 yang baru terbentuk 24 TPID.

Keberadaan TPID ini menjadi strategis di tengah gejolak harga pangan dalam beberapa waktu terakhir. Selama tahun 2010, kegiatan TPID difokuskan pada upaya memperkuat stok dan distribusi pasok bahan makanan serta melakukan identifikasi dan penindakan terhadap aksi penimbunan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, TPID juga mengintensifkan komunikasi pada masyarakat guna menggiring ekspektasi masyarakat terhadap terjaganya pasok pangan.

Beberapa contoh nyata yang sudah ditempuh TPID, misalnya, TPID Sulampua melakukan identifikasi titik masalah distribusi di daerah dan pola ketersediaan pasokan beras di tiap daerah. TPID Kalimantan, misalnya, mendorong pemberian bantuan saprodi (sarana produksi) kepada petani untuk mendukung peningkatan produksi cabe.

Namun, berbagai tantangan berat masih dihadapi oleh TPID sehingga menyebabkan

masih terbatasnya efektivitas pengendalian harga. Permasalahan seperti terbatasnya sarana dan prasarana penunjang produksi dan pasca produksi, infrastruktur (jalan, jembatan dan pelabuhan) antardaerah yang belum memadai, distorsi struktur pasar pada beberapa komoditas strategis, dan panjangnya rantai distribusi barang.

Untuk menghadapi tingginya potensi risiko berlanjutnya gejolak harga di tahun 2011, TPID di sejumlah daerah menempuh berbagai langkah-langkah antisipatif seperti perumusan langkah strategi untuk meningkatkan kapasitas perekonomian. Contoh nyata apa yang dilakukan TPID Jakarta, memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait dan kerjasama antardaerah guna mempersiapkan operasi pasar ketika terjadi gejolak harga bahan pangan dan memastikan ketersediaan pasok bahan pokok.

Selain itu, bisa menengok upaya TPID se Jawa Barat yang merilis 10 langkah strategis untuk pengendalian inflasi. Beberapa poin penting dari langkah strategis tersebut, misalnya, peningkatan produktivitas padi, cabe, perikanan, ternak, operasi pasar beras dan pangan lainnya, persiapan sistem distribusi pangan melalui pembentukan *food centre* dan terminal agrobisnis.

Bahkan, untuk memecahkan permasalahan yang belum mampu ditangani oleh pemerintah daerah, Bank Indonesia bersama kementerian terkait akan memperkuat koordinasi melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Tujuan pertemuan itu untuk merumuskan solusi berbagai isu strategis nasional terutama terkait pada permasalahan inflasi. ●

*) Peneliti Ekonomi Muda di Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter



Data dan Fakta **Inflasi**

Dian Prima Susiandri *)

Data historis menunjukkan Indonesia memiliki level inflasi yang relatif tinggi. Pada dekade ini inflasi Indonesia rata-rata tercatat sebesar 8,7%. Angka ini masih

cukup tinggi dibandingkan dengan inflasi di beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand yang rata-rata mencapai 2,2% dan 2,6%. Tidak hanya itu, inflasi

itu juga dibarengi dengan disparitas antar tahun yang cukup lebar. Pasca krisis ekonomi 97/98, pada beberapa periode seperti pada tahun 2001, 2005 dan 2008, inflasi melonjak sangat signifikan hingga menembus level *double digit*. Puncaknya di tahun 2005, inflasi menembus di atas 17% (yoy).

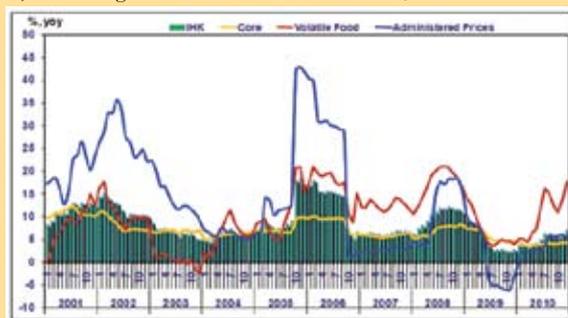
Melonjaknya inflasi hingga *double digit* dalam satu dekade terakhir, lebih banyak dipicu oleh kebijakan kenaikan harga *administered*

terutama harga BBM bersubsidi. Pada tahun 2005 dan 2008, BBM bersubsidi meningkat masing-masing sekitar 87% dan 28%, sehingga mendorong inflasi ke level

17% (yoy) dan 11% (yoy). Selain itu, inflasi yang bergejolak juga dipengaruhi oleh inflasi *volatile food*. Pengaruh kuat inflasi *volatile food* ini nampak pada tahun 2010 yang antara lain dipengaruhi kenaikan harga pangan akibat gangguan iklim. Untuk inflasi inti, perkembangan dalam dekade terlihat dalam tren menurun dibandingkan dengan dekade sebelumnya.

Inflasi pada tahun 2010 tercatat 6,96% (yoy). Inflasi ini dipengaruhi oleh inflasi *volatile food* yang tercatat sangat tinggi yaitu 17,74% (yoy), atau jauh lebih tinggi dari rata-ratanya dalam sepuluh tahun terakhir yang mencapai sekitar 9% (yoy). Sementara itu, inflasi *administered* tercatat 5,40%. Inflasi inti tercatat 4,28% (yoy) atau cukup rendah dibandingkan rata-ratanya dalam sepuluh tahun terakhir yang mencapai sekitar 7,5%. ●

*) Peneliti Ekonomi Muda Senior di Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter



Grafik. Perkembangan Inflasi

INFLASI

INFLASI adalah kecenderungan naiknya harga barang-barang pada umumnya.



Dalam mengatur laju inflasi, Bank Indonesia berupaya agar uang yang beredar "tidak terlalu banyak" dan "tidak terlalu sedikit" di masyarakat.



Kebijakan Bank Indonesia mempengaruhi jumlah uang yang beredar, tingkat bunga, serta perilaku masyarakat dan dunia usaha.



Aku kebanyakan makan...



Aku kekurangan makan...



Nah, ... ini baru pas!



Bank Indonesia selalu berusaha untuk mempertahankan keseimbangan, karena, apabila jumlah uang beredar terlalu banyak, akan terjadi **inflasi**...



... sedangkan apabila jumlah uang beredar terlalu sedikit, maka akan terjadi **deflasi**, uang beredar yang terlalu sedikit menjadi menyebabkan penyaluran kredit menjadi sedikit.



Pengendalian jumlah uang beredar dilakukan dengan beberapa cara, antara lain Operasi Pasar Terbuka, penetapan tingkat diskonto dan cadangan wajib minimum. Bank Indonesia juga menentukan **sasaran inflasi** setiap awal tahun.



kita usir **inflasi** yang tinggi jauh-jauh!



Dengan demikian, bank Indonesia berperan aktif dalam memajukan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menjaga **inflasi** tetap dalam level yang rendah.



hal tersebut didukung pula oleh peraturan perpajakan dan anggaran pembangunan yang dikeluarkan pemerintah. Inilah **SINERGI** antara pemerintah dan Bank Indonesia.



KETAWA ALA BI

Mandi Lumpur

Seorang pria tua masuk ke ruang dokter untuk *check up* tahunan. Setelah pemeriksaan, dokter berkata: "Maaf pak, kami menyimpulkan bahwa anda hanya akan hidup untuk 6 minggu lagi"

"Tapi dok, saya merasa sehat... Apakah ada yg bisa saya lakukan?"

Terdiam sesaat, dokter menjawab: "Anda mungkin bisa ke spa kesehatan yg baru di ujung jalan ini dan mandi lumpurlah setiap hari".

Dengan semangat pasien berkata: "Dan itu dapat menyembuhkan saya?"

"Tidak" jawab dokter "Tapi itu akan membuat anda terbiasa dengan tanah" ●

Di Rumah Sakit Jiwa

DR : Man sedang apa ?

Pasien : Sedang tulis surat dok

DR : Oh , untuk siapa man ?

Pasien : Untuk saya sendiri

DR : Isi suratnya apa Man ?

Pasien : Gak tau dok, kan sampainya besok. ●

Password Komputer

Seorang *office boy* (OB) membersihkan lantai dekat kursi Direktur. Saat itu sang direktur sedang mengerjakan sesuatu yang penting di depan komputernya. Ia tidak menyadari si OB mengintipnya.

Setelah itu, si OB sesumbar kepada rekan-rekannya, bahwa ia satu-satunya yang tahu *password* komputer si Boss.

Seorang staf IT yang ingin mengetahui rahasia perusahaan, mendekati si OB, "Saya bayar berapa untuk *password* itu?" tanya si IT.

Sang OB dengan gugup menjawab, "Dua ratus ribu!"

"Kemahalan! Seratus," kata staf IT.

"Oke," si OB pun setuju.

Setelah memberikan uangnya, si staf IT mengambil pulpen & kertas. "Oke, apa *password*-nya?"

"Bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang! (*****)", jawab si OB sambil berbisik... ●

Buat Ketawa Malam Ini:

X : Kenapa lu batal nikah?

Y : Gw ama cewek gw beda keyakinan

X : Oh, beda agama maksud lu?

Y : Bukan. Beda keyakinan aja. Gw yakin gw ganteng, tapi cewek gw gak yakin. ●

10 Jurus FKPI-D Jabar Jinakkan Inflasi



Suasana konferensi pers hasil *High Level Meeting* Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi (FKPI) Jawa Barat.

Forum Komunikasi Pengendalian Inflasi Daerah (FKPI-D) Jawa Barat merilis 10 (sepuluh) jurus guna menjinakkan inflasi yang berkeliaran

di wilayah bumi Parahyangan di sepanjang tahun 2011. Berkat keseriusan kerjasama tim di FKPI-D yang beranggotakan berbagai unsur tersebut, inflasi di wilayah kota Bandung tahun 2010 lalu bisa dikendalikan di bawah angka inflasi nasional 5%. Adapun 10 jurus yang sudah disiapkan FKPI-D Jabar tersebut antara lain, peningkatan produktivitas padi, cabe, perikanan, ternak, operasi pasar beras dan pangan lainnya, persiapan sistem distribusi pangan melalui pembentukan *food centre* dan terminal agrobisnis.

Dari berbagai pertemuan FKPI-D Jabar diketahui bahwa meski inflasi di sejumlah kota di Jabar terbilang terkendali—yakni umumnya di bawah 5%, namun begitu masih ada sejumlah persoalan krusial yang kudu mesti diwaspadai. Misalnya, anomali iklim masih berlanjut, *sudden reversal* atas *capital inflow*, peningkatan permintaan dalam negeri, serta rencana kebijakan pemerintah dalam pembatasan BBM bersubsidi. ●

Inflasi Bergolak, TPID Bergerak



Sebagaimana hasil survei BPS pada bulan Desember 2010, inflasi tertinggi dialami oleh kota Lhokseumawe. Di bulan itu, inflasi Lhokseumawe mencapai 2,97 persen dengan IHK 128,44. Inflasi Kota Lhokseumawe dominan diakibatkan oleh komoditas beras, cabe merah dan kelompok ikan segar (terutama tongkol dan bandeng)

Kondisi ini tentunya sangatlah meresahkan. Mengatasi kondisi ini, mulai

24 Januari 2011 Pemkot Lhokseumawe menggelar operasi pasar untuk beras dan berlangsung selama beberapa hari. Langkah ini berdasarkan rekomendasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Lhokseumawe.

- Kondisi cuaca yang buruk mengakibatkan produksi tanaman cabe dan padi menurun ditambah dengan saluran irigasi yang buruk dan areal

pesawahan tergenang air (banjir). Hal ini juga mempengaruhi hasil tangkapan ikan segar karena nelayan tidak berani melaut.

- Kab. Aceh Utara dan Kab. Bireuen yang posisinya bertetangga dengan Kota Lhokseumawe merupakan sentra penghasil beras, apabila musim panen, beras sudah dipesan oleh pengusaha-pengusaha medan. Pengusaha-pengusaha tersebut telah melakukan pembayaran dimuka dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah (dalam hal ini bulog). Akibatnya terjadi kelangkaan di wilayah Aceh sendiri.

Ke depan, diharapkan TPID Kota Lhokseumawe dapat lebih aktif dan produktif menghasilkan konsep-konsep pemikiran yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya, sehingga mampu mengatasi inflasi di Kota Lhokseumawe dan daerah sekitarnya. ●





Bila Psikis Sapi Nyaman, Produksi Susu Pun Melimpah

Semakin nyaman kondisi fisik dan psikis seekor sapi perah, akan semakin besar produksi susu segar. Untuk itu, petani sapi perah di seantero jagad dunia ini berupaya semaksimal mungkin menjaga kondisi fisik dan psikis sapi agar tetap bugar dan nyaman. Agar kondisi fisik sapi tetap fit, sudah barang tentu kualitas asupan seperti pakan ternak pun diperhatikan dengan seksama. Begitu pula dalam hal menjaga kondisi psikis sapi, peternak sapi pun sampai memandang perlu memberi karpet sebagai alas kandang. Karpetnya juga bukan sembarang karpet, tapi karpet khusus untuk ternak, yang bisa membuat nyaman. Di atas karpet ini, sapi-sapi tidak akan merasakan dingin atau licinnya lantai kandang. Dan memang terbukti bahwa dengan tindakan tersebut, tingkat kebugaran sapi semakin prima dan produksi susunya pun meningkat. Upaya inilah yang dilakukan para peternak sapi yang terhimpun dalam Gabungan Kelompok Tani di Desa Getasan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Pemakaian karpet di lantai kandang sapi barulah salah satu fasilitas dari Program Pengembangan Klaster Sapi Perah yang digagas oleh Kantor Bank Indonesia (KBI) Semarang. Program ini merancang pembangunan Kandang Komunal Sapi yang terbilang moderen dengan 20 sapi menetap didalamnya. Fasilitas lainnya yang disediakan adalah pembuatan sanitasi kandang yang baik. Bahkan limbah sapi pun diolah menjadi biogas melalui metode pengolahan limbah yang dibangun atas kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Selain membangun prasarana fisik, KBI Semarang pun membekali peternak dengan pelatihan mendiversifikasi produk susu sapi

menjadi sabun mandi, es krim, yoghurt, krupuk, dodol dan lainnya.

Kepedulian Tim Bank Indonesia *Social Responsibility* (BSR) KBI Semarang tak berhenti hanya sampai di situ. Sebuah Sistem Informasi tengah dikembangkan guna mendata dan memantau kondisi setiap sapi yang dikelola peternak agar mengalami peningkatan. Selain itu, Tim BSR KBI juga ikut memikirkan pemasaran produk olahan susu sapi peternak hingga bagaimana pemeliharaan kandang sapi yang sudah terbangun moderen terawat dengan baik.

Sejak program tersebut dijalankan,



peternak sapi Desa Getasan pun sudah dapat tersenyum lebar. Parjono, misalnya. Ia adalah ketua Gabungan Kelompok Tani di desanya yang sudah merasakan betul manfaat dari pengelolaan sapi yang moderen. Produk susu sapi dan olahannya kini meningkat yang berarti pundi-pundinya pun semakin bertambah. Ia adalah gambaran bagaimana tingkat kesejahteraan peternak lain di Getasan pun mulai membaik sehingga bisalah tersenyum lepas menatap masa depan mereka. ●

Operasi Beras Digelar Agar Inflasi Tak Melar



Sebutir beras berpotensi memicu laju angka inflasi di berbagai daerah. Betapa tidak, kalau sampai butiran beras tadi pasokannya mengalami ketersendatan saja, maka sudah cukup memicu kenaikan harga dan membuat masyarakat pun menjerit. Agar harga beras tak melonjak, mau tak mau sebuah operasi pasar beras pun digelar. Langkah inilah yang ditempuh oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Batam yang didalamnya beranggotakan unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Perum Bulog, Kantor Bank Indonesia (KBI) Batam, Pemda Batam.

Menurut Ketua Teknis TPID Batam, Uzersyah yang juga Deputy Bidang Ekonomi dan Moneter KBI Batam mengatakan bahwa angka inflasi 2010 di wilayah itu tercatat 7,40% atau di atas angka target inflasi nasional sebesar 5%. Ia juga mengatakan bahwa inflasi bulan Desember 2010 meningkat 0,61% dibanding bulan sebelumnya yang hanya tercatat 0,41%. Sumber pemicu melejitnya angka inflasi adalah kenaikan harga bahan pangan. Ada indikasi bahwa angka inflasi 2011 pun akan meningkat.

Selain dipicu kenaikan harga beras, inflasi di Batam pun dipengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Singapura yang cenderung melemah hingga pertengahan Januari 2011. Kenyataan ini membuat harga produk barang dari negeri jiran itu pun ikut melejit. Nah, disinilah tantangan berat TPID guna menjinakkan inflasi. "Dibentuknya Tim TPID ini bertujuan untuk memantau, memonitor perkembangan harga dipasaran, sehingga inflasi harga dipasar dapat ditekan," ujar Uzersyah. ●

